



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2021**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2019-2024. 4 (empat) sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan; 2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan; 3. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri; 4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting.

Hasil capaian kinerja menunjukkan terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang capaiannya sangat tinggi yaitu : 1. Meningkatkan Kontribusi sektor industri pengolahan 96,33% dan 2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan 99,46%; kemudian terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang capaiannya tinggi yaitu : 1. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri 88,57% serta terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang capaiannya rendah yaitu : 1. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting 56,52% dengan realisasi keuangan sebesar 96,69%.

Dari hasil pengukuran kinerja baik dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tahun 2020 secara keseluruhan menunjukkan persentase yang cukup memuaskan, meskipun



dirasakan masih dijumpai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Namun dalam kondisi keterbatasan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah berupaya secara maksimal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2020.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020. Dalam dokumen ini dimuat berbagai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam bentuk pengukuran capaian kinerja output, kinerja program, dan kinerja sasaran.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung akan tergambar keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program sebagai cerminan pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2020.

**Bandar Lampung, Februari 2021**

**KEPALA DINAS,**



**SATRIA ALAM, SE, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	1
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
2.1    Rencana strategis 2019-2024 .....	7
2.2    Visi dan Misi .....	9
2.3    Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	10
2.4    Indikator Kinerja Utama .....	13
2.5    Strategi dan arah kebijakan .....	14
2.6    Perjanjian Kinerja Perubahan 2020 .....	16
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	17
3.1    Kerangka Pengukuran Kinerja .....	17
3.2    Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020.....	19
3.3    Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	23
3.4    Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2020 .....	36
3.5    Prestasi OPD yang di raih selama Tahun 2020 .....	38
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	39
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung .....	3
Tabel 1.2 Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung .....	13
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020.....	16
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung .....	18
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020.....	20
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	24
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 .....	25
Tabel 3.5 Pencapaian Target Misi .....	25
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan .....	26
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan.....	28
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri.....	29

Tabel 3.9	Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2020 .....	31
Tabel 3.10	Ekspor Berdasarkan Komoditi Utama Provinsi Lampung Tahun 2020 .....	32
Tabel 3.11	Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung Tahun 2020 .....	33
Tabel 3.12	Perbandingan Nilai Ekspor non migas Provinsi Lampung dengan nilai ekspor non migas Nasional .....	34
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting .....	34
Tabel 3.14	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1.1 Rekapitulasi Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang.....	4
Gambar 1.2 Data Pegawai PNS berdasarkan pendidikan.....	5
Gambar 1.3 Data Pegawai Non PNS berdasarkan pendidikan.....	5



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan , pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama , pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;

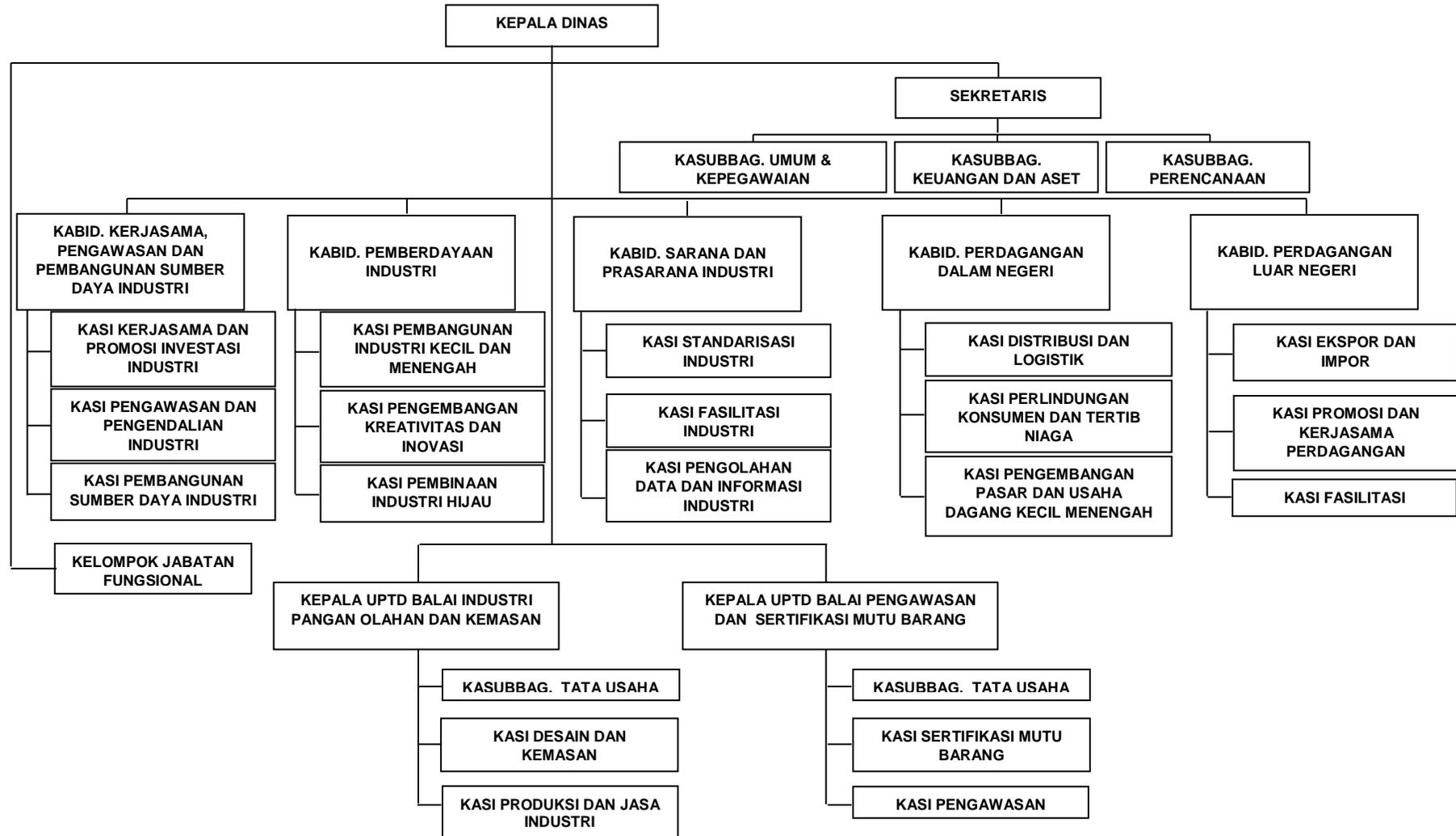


- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;
- i. Pembinaan dan fasilitas tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan Penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provisni Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk melaksanakan serta menunjang tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut :

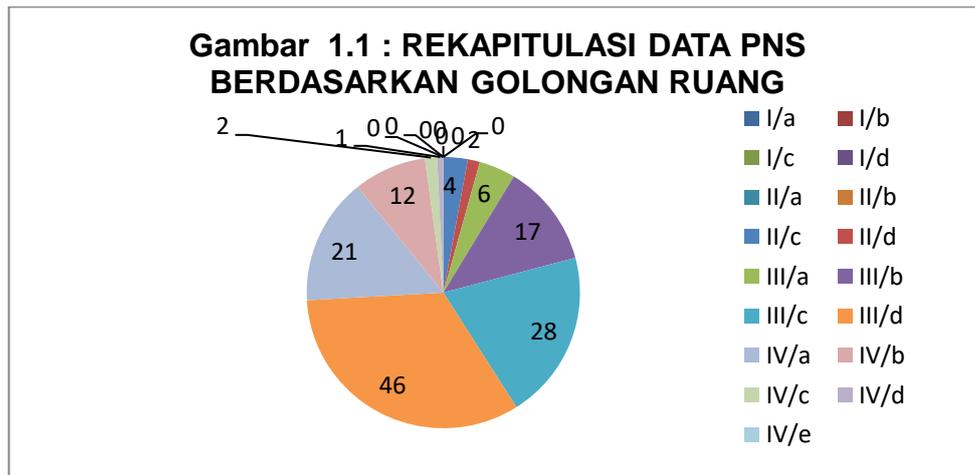


Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung





Sampai dengan Desember tahun 2020, Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung memiliki 166 orang pegawai yang terdiri dari 139 Pegawai Negeri Sipil dan 27 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

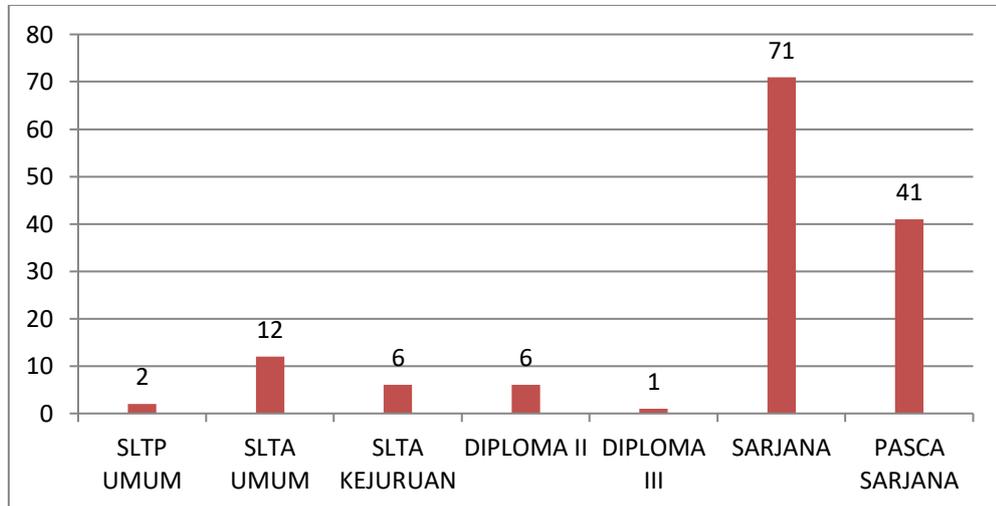


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada DINAS Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II/c, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV/d. Jumlah PNS dengan golongan III/d adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 46 orang, kemudian PNS dengan golongan ruang IV/d adalah yang terendah dengan jumlah sebanyak 1 orang.



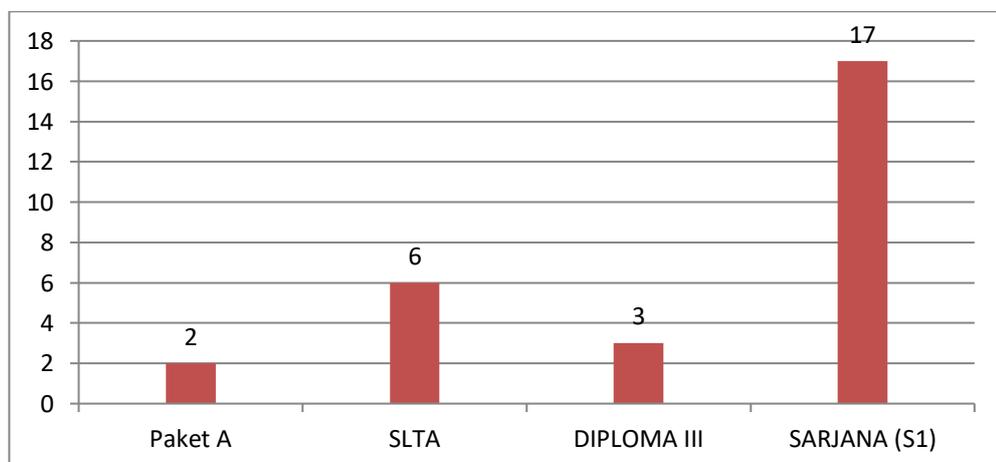
Gambar 1.2 : Data PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTP dengan jumlah 2 orang, sedangkan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 41 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 71 orang. Sedangkan ketersediaan pegawai non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.3 : Data Pegawai Non PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



Berdasarkan gambar 2.3 diatas, rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan Paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 17 orang.

Dalam pengelolaan asset sampai dengan Desember 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah asset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 2.1 : Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Tanah	30	8,530,850,000
2	Peralatan dan Mesin	2,429	14,710,699,996
3	Gedung dan Bangunan	36	7,153,569,316
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9	1,066,707,335
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2,504</b>	<b>31,461,826,647</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan table 2.1 diatas, Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung memiliki asset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jala, irigasi dan jaringan. Kesemua asset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung, Pringsewu dan Lampung Selatan.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 RENSTRA 2019 -2024**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2018 lalu sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan



kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat



sinergi yang baik antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang telah sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khususnya pada sektor industri dan perdagangan.

## **2.2 VISI DAN MISI**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

### **"Rakyat Lampung Berjaya".**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisinya permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- 1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.**
- 2. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**
- 3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.**
- 4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.**
- 5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
- 6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024, maka Dinas Perindustrian dan



Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan **misi lima** yaitu : **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**

### **2.3 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung”**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%).
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah Andil inflasi bahan makanan (%).

Ke - 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian



dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut ;



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2 Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3 Meningkatkan nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4 Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55



## 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung selama 1 tahun
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku)	BPS Provinsi Lampung	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Lampung selama 1 tahun
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah	Nilai ekspor non migas selama 1 tahun	BPS Provinsi Lampung	Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung selama 1 tahun
4	Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	%/tahun	Menjaga Agar Harga Pokok stabil agar tidak melambung tinggi	Rata-rata fluktuasi harga 19 bahan pangan pokok penting dalam satu tahun	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Hasil monitoring harga di 4 pasar Bandar Lampung dan 1 pasar di Kota Metro untuk 19 jenis bahan pangan pokok penting



## **2.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di perlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang merupakan resultan dari wewenang, misi, visi maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang obyektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternatif-alternatif strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA</b>			
<b>MISI 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan Perdagangan dalam menjaga stabilitas perekonomian Provinsi Lampung	1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Industri secara berkelanjutan 1. Meningkatkan Daya Saing Industri andalan, Pendukung dan hulu	1. Pengembangan Sumber Daya Industri 1. Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri 2. Pemberdayaan Industri 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri 4. Peningkatan Layanan Rumah Kemas dan Workshop Industri
	2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	1. Pembinaan PKM dan Promosi Produk PKM	1. Mendorong para PKM memasarkan produknya hingga pasar regional 2. Memberikan Fasilitas bagi para PKM untuk meningkatkan literasi tentang ekonomi digital
	3. Meningkatkan nilai Perdagangan Luar Negeri	1. Perluasan Pasar Ekspor Non Tradisional	1. Diversifikasi Komoditi Ekspor 2. Peningkatan standar dan Mutu produk ekspor 3. Peningkatan Promosi Luar Negeri
	4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	1. Pengendalian harga barang pokok dan strategis	1. Pengembangan jaringan distribusi 2. Kontinuitas pemantauan harga 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan



## 2.6 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2020

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kontribusi sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	20,15
2	Meningkatkan Kontribusi sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,20
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	3,5
4	Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil Inflasi Bahan makanan	%	0,10 – 0,50

### PROGRAM

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	2,610,284,470
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	883,959,100
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Rp	67,047,300
4. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	Rp	270,525,000
5. Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp	600,255,000
6. Pengembangan Sumber Daya Industri	Rp	91,817,300
7. Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan atau/jasa	Rp	86,237,600
8. Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Rp	476,333,900
9. Pengujian Mutu Barang	Rp	471,040,850
10. Pemberdayaan Industri	Rp	1,274,840,000
11. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Rp	207,601,100
12. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Rp	142,271,250
13. Peningkatan Layanan Rumah Kemasan dan Workshop Industri	Rp	199,713,000
<b>Jumlah Rp</b>		<b>7,381,925,870</b>



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 - 2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai ( $< 100\%$ ) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung**

No	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari



masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang di tuangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 03/KP/V.26/Sekret.3/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

### **3.2 Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2020**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai



ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 03/KP/V.26/Sekret.3/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung**  
**Tahun 2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Realisasi Tujuan	Capaian (%)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	1 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	8,62	-5.25		1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	%	20.15	19.41	96.33
		2 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,26	-6.64		2 Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	%	11.2	11.14	99.46
						3 Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Miliar US\$	3.5	3.1	88.57
2	Menjaga Stabilitas Harga	1 Laju Inflasi	3,0 - 3,5	2.00		4 Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting	%	0,10 - 0,50	1.15	56.52



Tingkat pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan Desember tahun 2020 tidak tercapai ditunjukkan pada indikator tujuan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan target tujuan 8.62% dan Realisasi tujuan -5.25%; 2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan target tujuan 7.26 dan realisasi tujuan -6.64%; 3. Laju Inflasi dengan target tujuan 3.0% – 3.5% dan realisasi tujuan 2%.

Nilai PDRB pada sektor industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 44.324,68 (Miliar rupiah) sedangkan nilai PDRB pada sektor industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 46.778,31 (Miliar rupiah) sehingga pertumbuhan nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun 2020 sebesar -5,25%. Nilai ini didapatkan dari Nilai PDRB Industri Pengolahan tahun 2020 terhadap nilai PDRB Industri Pengolahan tahun 2019. Dilihat dari rumus berikut ini :

$$\left( \frac{\text{PDRB}_n - \text{PDRB}_{n-1}}{\text{PDRB}_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan : 1.  $\text{PDRB}_n$  = Nilai PDRB harga Konstan tahun 2020

2.  $\text{PDRB}_{n-1}$  = Nilai PDRB harga Konstan tahun 2019

Hal ini disebabkan melemahnya perekonomian pada masa COVID-19 yang berdampak pada industri dimana kegiatan usaha yang terganggu karena penurunan omset, pengurangan kapasitas produksi, pengurangan pembelian bahan baku pada industri sebagai akibat dari menurunnya permintaan pasar bahkan terdapat industri tidak beroperasi sepanjang pandemic COVID-19. Adapun Kontribusi nilai PDRB sektor Industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 68.831,83 (Miliar Rupiah) atau sebesar 19,41% dari nilai Total PDRB tahun 2020 sebesar 354.631,69 (Miliar Rupiah) berdasarkan harga berlaku.

Nilai PDRB pada sektor perdagangan pada tahun 2020 sebesar 28.273,12 (Miliar rupiah) sedangkan nilai PDRB pada sektor perdagangan pada tahun 2019 sebesar 30.285,06 (Miliar rupiah) sehingga pertumbuhan nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2020 sebesar -6,64%. Nilai ini didapatkan dari Nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2020 terhadap nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2019. Dengan rumus yang sama diatas.



Hal ini disebabkan melemahnya perekonomian pada masa COVID-19 yang berdampak pada Rumah tangga dari kalangan masyarakat kecil dimana terdapat ancaman kehilangan pendapatan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal terutama rumah tangga miskin dan rentan sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat dan penurunan konsumsi selain itu di berlakukannya jam operasional yang lebih singkat pada pusat-pusat perbelanjaan, PSBB di beberapa tempat sehingga meminimalisir mobilisasi masyarakat ke pusat perbelanjaan. Hal ini berimbas pada nilai perdagangan Provinsi Lampung.

Walaupun nilai pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengalami kontraksi sebesar -6.64% kinerja sektor perdagangan masih baik dengan Kontribusi nilai PDRB sektor perdagangan pada tahun 2020 masih urutan ketiga sebesar 39.513,83 (Miliar Rupiah) atau sebesar 11,14% dari nilai Total PDRB tahun 2020 sebesar 354.631,69 (Miliar Rupiah) berdasarkan harga berlaku.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 diantaranya ;

1. Menjaga stabilisasi harga barang pokok dan ketersediaan dimasa pandemik COVID-19 melalui operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan bahan pokok (Gula).
2. Penetrasi Pasar beberapa komoditi yang harganya melonjak naik.
3. melakukan Bimbingan teknis bagi Industri Kecil Menengah (IKM) berupa peningkatan kapasitas usaha dan diversifikasi produk.
4. Fasilitasi pemasaran on-line/platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran.
5. Pemberian stimulant dari dana pusat terhadap IKM untuk menjalankan usahanya.
6. Memberikan kelonggaran industri untuk tetap beroperasi di masa pandemik COVID-19 dengan menerapkan protocol kesehatan.

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**, ditunjukkan pada indikator meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan (96,33%) dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan (99,46%); kemudian kriteria penilaian realisasi



kinerja **tinggi**, ditunjukkan pada indikator meningkatnya nilai perdagangan luar negeri (88,57%), serta kriteria penilaian realisasi kinerja **rendah**, ditunjukkan pada indikator menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting (56,52%)

### **3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan Strategis, Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan Misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih focus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung". Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%).
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB (%).
3. Meningkatkan nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah andil inflasi bahan makanan (%).

Ke – 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan di pandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah



kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah provinsi lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industry dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industry pengolahan (%)	1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
		Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%)	2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3. Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas Harga	Laju inflasi (%)	4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil Inflasi bahan Makanan (%)	0,10 - 0,50	0,10 - 0,51	0,10 - 0,52	0,10 - 0,54	0,10 - 0,55

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 sebanyak 4 sasaran. Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	20.15	19.41	96.33
2	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor perdagangan dalam PDRB	%	11.2	11.14	99.46
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas	Miliar US\$	3.5	3.1	88.57
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil Inflasi bahan Makanan	%	0.10 - 0.50	1.15	56.52

Dari sebanyak 4 Sasaran yang digambarkan pada tabel diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 5	4	1	96.33	1	88.57			1	56.52	-	-
			1	99.46								
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>195.79</b>	<b>1</b>	<b>88.57</b>			<b>1</b>	<b>56.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	20.15	19.41	96.33	20.50	-	-	20.85	-	-	21.20	-	-	21.56	-	-

Sasaran meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu “Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB” adalah sebesar 19,41% dari target sebesar 20,15% yang di rencanakan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2020** sehingga persentase capaian kerjanya adalah 96,33 %, capaian ini telah sesuai dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun pertama renstra sehingga tidak terdapat perbandingan capain kinerja untuk indikator persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB, kemudian bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 90,03 %.

Walaupun capaian indikator Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB telah memenuhi target kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan, tetapi pada perjalanannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun



2020 dalam mencapai sasaran strategis ini. Dari hasil evaluasi, beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mencapai sasaran startegis Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
- Tidak tersedianya roadmap pembangunan SDM industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku *penyedia* dengan dunia industri selaku *user*;
- Hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
- Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung memiliki solusi diantaranya :

- Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri.



**Sasaran 2**

Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11.20	11.14	99.46	11.25	-	-	11.30	-	-	11.35	-	-	11.40	-	-

Sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu “Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB” dengan capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 11,14 % dari target sebesar 11,20 % yang direncanakan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2020** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,46 %, capaian ini terdapat di criteria tinggi dari target yang diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun pertama renstra sehingga tidak terdapat perbandingan capain kinerja untuk indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, kemudian bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 72,98 %

Nilai Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB mendekati target Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Namun nilai Pertumbuhan sektor perdagangan tidak tercapai di karenakan mobilisasi masyarakat lampung pada beberapa pusat perbelanjaan mulai menuju pola normal pada triwulan IV seiring dengan berlangsungnya HBKN (Natal dan libur akhir tahun) yang mana pada periode COVID-19 terpantau melandai menuju level sebelum COVID-19. Perkembangan ini mengindikasikan peningkatan aktivitas konsumsi (permintaan) masyarakat lampung pada triwulan IV.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Provinsi Lampung di sepanjang tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Konsumsi masyarakat selama HBKN tahun 2020 juga



diperkirakan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan domestik ke beberapa lokasi wisata di Provinsi Lampung juga mengalami penurunan seiring adanya arahan *physical distancing* untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari sisi eksternal, permintaan ekspor dari sebagian besar Negara mitra dagang juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi di Negara-negara tersebut akibat pandemic COVID-19.

**Sasaran 3**

**Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai Ekspor Non Migas	%	3.55	3.14	88.45	3.55	-	-	3.60	-	-	3.70	-	-	3.80	-	-

Sasaran Meningkatkan Nilai Perdagangan Luar Negeri dapat dilihat dari 1 indikator yaitu “Nilai Ekspor Non Migas” dengan capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 3,14 miliar US\$ dari target sebesar 3,55 miliar US\$ yang di rencanakan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2020** sehingga persentase capaian kinerja adalah 88,45 %, capain ini terdapat di kriteria tinggi di capaian kinerja. Tahun 2020 adalah tahun pertama renstra sehingga tidak terdapat perbandingan capain kinerja untuk indikator Nilai Ekspor Non Migas, kemudian bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 82,63 %.

Pertumbuhan net ekspor diperkirakan tidak akan meningkat di triwulan IV, hal ini dipengaruhi oleh penurunan produksi komoditas perkebunan sebagai salah penopang ekspor utama Provinsi Lampung pasca puncak musim panen di triwulan III 2020. Di samping itu, secara seasonal terdapat kemungkinan kenaikan volume impor barang konsumsi menjelang Natal dan Liburan akhir tahun seiring dengan dengan peningkatan permintaan sehingga berpengaruh pada pelemahan net ekspor. Pemulihan ekonomi Negara mitra dagang utama Provinsi Lampung meningkatkan permintaan ekspor untuk industri pengolahan makanan cukup signifikan dari Amerika, Eropa, Asia Timur dan Arab Saudi.



Selain itu, untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, Pemerintah Pusat memberikan dukungan kepada dunia usaha melalui percepatan proses perizinan ekspor dan impor serta peningkatan layanan melalui National Logistic Ecosystem.

Beberapa factor menjadi penyebab penurunan ekspor di Provinsi Lampung. Pertama, terkait dengan dampak pandemic COVID-19 terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi dunia sehingga memicu perkiraan pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2020 yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Kedua, harga sebagian besar komoditas ekspor Provinsi Lampung pada tahun 2020 berada pada tren yang menurun, kecuali CPO dan Kopi Robusta. Rata-rata harga batubara per oktober 2020 tercatat sebesar USD 56,44 per metric ton dibawah rata-rata harga tahun 2019 USD 69,40 per metric ton. Selain itu, harga rata-rata lada hitam yang juga menjadi penopang ekspor Provinsi Lampung hingga November 2020 tercatat dalam tren menurun sebesar 895,77 MYR/100 kg lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 911,48 MYR/100 kg. Eksport batu bara di sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan akibat terkoreksinya permintaan global dan domestic. Meski demikian, penurunan ekspor yang lebih dalam dapat ditahan oleh peningkatan ekspor komoditas CPO yang hingga triwulan III 2020 tumbuh 21,35 % (yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Begitu pula ekspor kopi robusta hingga triwulan III 2020 tumbuh 11,26 % (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Peningkatan ekspor kopi robusta ditopang oleh volume produksi yang naik 13,63 % (yoy) untuk periode yang sama, di tengah harga rata-rata (hingga oktober) yang turun dari 0,80 MYR/100 kg pada tahun 2019 menjadi 0,78 MYR/100 kg pada tahun 2020.

Berikut kami sajikan data ekspor non migas Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2020 beserta perbandingan dengan nilai ekspor non migas tahun 2019 sebagai berikut :



**Tabel 3.9**  
**Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung**  
**Tahun 2020**

No	Bulan	Nilai Ekspor 2019 (juta US\$)	Nilai Ekspor 2020 (juta US\$)	Kenaikan / Penurunan (juta US\$)	Persentase Kenaikan / Penurunan (%)
1	Januari	265.42	206.31	-59.11	-22.27
2	Februari	245.99	250.44	4.45	1.81
3	Maret	220.06	222.85	2.79	1.27
4	April	195.81	246.78	50.97	26.03
5	Mei	252.51	174.21	-78.3	-31.01
6	Juni	207.01	221.06	14.05	6.79
7	Juli	218.67	276.85	58.18	26.61
8	Agustus	251.97	207.37	-44.6	-17.70
9	September	273.12	283.86	10.74	3.93
10	Oktober	249.09	298.5	49.41	19.84
11	November	267.49	361.02	93.53	34.97
12	Desember	282.71	395.51	112.8	39.90
	<b>TOTAL</b>	<b>2,929.85</b>	<b>3,144.76</b>	<b>214.91</b>	<b>7.34</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan tabel 3.9, nilai ekspor non migas sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 3,14 miliar US\$. Nilai ini mengalami kenaikan, ekspor terendah terjadi pada bulan Mei dengan nilai sebesar 174,21 juta US\$ sedangkan nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan nilai sebesar 395,51 US\$. Dari Tabel 3.9 di atas, terlihat bahwa nilai ekspor Provinsi Lampung bergerak secara fluktuatif dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2020.



**Tabel 3.10**  
**Ekspor Berdasarkan Komoditi Utama Provinsi Lampung**  
**Tahun 2020**

No	Komoditi Unggulan	Nilai (US \$)		Perubahan
		2019	2020	
1	MINYAK SAWIT/CPO	856,681,117.9	1,056,910,041.6	23.37
2	KOPI ROBUSTA	332,212,109.4	366,975,755.5	10.46
3	BATUBARA	451,543,832.8	306,316,088.9	(32.16)
4	NANAS KALENG	165,678,358.8	231,737,237.0	39.87
5	UDANG TANPA KEPALA	149,391,406.1	202,760,277.7	35.72
6	PULP	203,400,150.9	170,860,827.3	(16.00)
7	BUNGKIL SAWIT	148,676,969.6	162,541,434.0	9.33
8	KARET SIR 20	118,930,975.5	108,506,172.5	(8.77)
9	ASAM LEMAK SAWIT	5,607,227.9	57,181,074.6	919.77
10	LADA HITAM	36,175,955.0	56,220,727.3	55.41
11	LAINNYA	461,600,812.5	424,752,236.0	(7.98)
	<b>TOTAL EKSPOR</b>	<b>2,929,898,916.4</b>	<b>3,144,761,872.4</b>	<b>7.33</b>

*Sumber : Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.*

Pada Tahun 2020, ekspor non migas Provinsi Lampung sebesar 3.144.761.872,4 US\$. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 214.862.956,0 US\$ atau sebesar 7,33% jika dibandingkan pada tahun 2019, dimana nilai ekspor Provinsi Lampung sebesar 3.144.761.872,40 US\$. Minyak Sawit/CPO merupakan komoditi yang memiliki kontribusi terbesar pada komposisi ekspor non migas pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 1.056.910.041,6 US\$ atau sekitar 33,61% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 23,37%. Batubara merupakan komoditi yang mengalami penurunan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 145.227.743,9 US\$ atau sebesar (32,16%).



**Tabel 3.11**  
**Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung**  
**Tahun 2020**

No	Komoditi Unggulan	Nilai (US \$)		Perubahan
		2019	2020	
1	UNITED STATES	386,185,321.3	504,256,653.3	30.57
2	CHINA	311,747,532.6	327,631,379.9	5.10
3	INDIA	209,507,301.1	305,432,884.2	45.79
4	PAKISTAN	226,506,692.4	253,031,187.9	11.71
5	ITALY	138,602,601.1	249,771,830.5	80.21
6	NETHERLANDS	154,593,749.2	186,505,764.9	20.64
7	JAPAN	192,061,521.0	116,840,407.5	(39.17)
8	NEW ZEALAND	50,469,953.1	111,585,040.0	121.09
9	PHILIPPINES	107,326,860.0	94,409,418.5	(12.04)
10	KOREA	156,169,509.2	77,369,558.3	(50.46)
11	LAINNYA	996,727,875.4	917,927,747.4	(7.91)
	<b>TOTAL EKSPOR</b>	<b>2,929,898,916.4</b>	<b>3,144,761,872.4</b>	<b>7.33</b>

*Sumber : Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.*

USA merupakan negara tujuan ekspor yang menyumbang nilai ekspor terbesar dengan nilai sebesar 504.256.653,3 US\$ atau sekitar 16,03% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 30,57%, dimana nilai ekspor ke USA pada tahun 2019 sebesar 386.185.321,3 US\$. Kemudian diikuti oleh negara China di tempat kedua sebagai negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai 327.631.379,9 US\$ atau sebesar 10,42% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 5,10% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tren kenaikan nilai ekspor non migas yang terjadi di tingkat nasional terlihat juga di Provinsi Lampung, walaupun kenaikan nilai ekspor non migas tidak signifikan di tingkat Nasional yaitu 0.01%. Berikut kami sajikan perbandingan ekspor non migas Provinsi Lampung dengan nilai ekspor non migas nasional sebagai berikut :



**Tabel 3.12**  
**Perbandingan nilai ekspor non migas Provinsi Lampung dengan nilai ekspor non migas Nasional**

No	Keterangan	Tahun		Perubahan
		2019	2020	
1	Nasional	154.989 Juta US\$	154.997 Juta US\$	0.01%
2	Provinsi Lampung	2.929 JutaUS\$	3.144 JutaUS\$	7.33%

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) diolah

Dari tabel 3.12 diatas terlihat bahwa nilai ekspor di tingkat nasional mengalami kenaikan sebesar 0,01%, dari 154.989 juta US\$ pada tahun 2019 naik menjadi 154.997 juta US\$ pada tahun 2020. Kondisi ini sama dengan kinerja ekspor Provinsi Lampung dimana nilai ekspor non migas Provinsi Lampung naik sebesar 7,33%, dari 2.929 juta US\$ menjadi 3.144 Juta US\$.

Tahun 2020 adalah tahun pertama renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai Ekspor Non Migas" tahun ini adalah sebesar 88.45 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka capaian kinerjanya mencapai 82,63 %.

#### Sasaran 4

Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.13**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Andil Inflasi Bahan Makanan	%	0.10 - 0.50	1.15	56.52	0.10 - 0.51	-	-	0.10 - 0.52	-	-	0.10 - 0.54	-	-	0.10 - 0.55	-	-

Sasaran “Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting” dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu “Andil inflasi Bahan Makanan” adalah sebesar 1,15% dari target sebesar kisaran 0,10 – 0,50% yang direncanakan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2020** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 56.52 %, capain ini terdapat di kriteria rendah di capaian kinerja. Tahun 2020 adalah tahun pertama renstra sehingga tidak terdapat perbandingan capain



kinerja untuk indikator Andil Inflasi Bahan Makanan, kemudian bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 52,17%.

Sepanjang tahun 2020, permintaan domestik terus menurun karena aktivitas ekonomi yang rendah seiring penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berbagai indikator permintaan domestik masih melambat yang mengindikasikan daya beli masyarakat yang belum pulih dan aktivitas ekonomi yang menurun akibat dampak pandemic COVID-19. Selain karena pola musiman permintaan akhir tahun, tekanan inflasi tersebut juga didorong oleh terbatasnya pasokan bahan pangan strategis, terutama komoditas aneka cabai, daging dan telur ayam ras. Rendahnya pasokan merupakan implikasi dari tidak optimalnya produksi aneka cabai di pertengahan tahun 2020 karena harga jual yang rendah sehingga menjadi disinsentif bagi petani. Komoditas cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh tidak optimalnya penyerapan oleh masyarakat di tengah banyaknya stok cabai Karena telah memasuki musim panen serta rendahnya permintaan masyarakat. sedangkan keterbatasan stok daging dan telur ayam disebabkan oleh implementasi kebijakan culling dan cutting program oleh pemerintah yang diberlakukan sejak akhir Agustus 2020. Faktor lainnya juga mendorong tercapainya nilai inflasi yang lebih tinggi dari target, antara lain tingginya curah hujan di sebagian besar wilayah produsen karena fenomena La Nina, belum optimalnya realisasi impor sesuai alokasinya serta perkembangan harga komoditas global yang terus mengalami kenaikan.

Sementara itu harga bawang putih turun seiring dengan ketersediaan pasokan yang lebih banyak pasca relaksasi impor bawang putih. Di sisi lain, tekanan inflasi masih terjadi pada komoditas seperti minyak goreng (andil : 0,16%), bawang merah (andil : 0,13%) dan tahu merah (andil : 0,13%). Kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga dari pemasok seiring dengan meningkatnya hargabahan dasar. Di sisi lain, kenaikan pada harga bawang merah disebabkan oleh keterbatasan pasokan Karena pergeseran musim tanam sejak akhir tahun 2019. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya persediaan benih akibat kadaluarsa atau rusak yang berujung pada pengurangan luas tanam di daerah sentra produksi. Selain itu, inflasi pada periode ini juga turut disumbang oleh kenaikan harga pada sub kelompok tembakau dengan andil (0,30%), dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah rokok putih



(andil : 0,14%) sejalan dengan kenaikan tariff cukai rokok di awal tahun oleh pemerintah yang diimplementasikan oleh pelaku usaha secara bertahap.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA 2020**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 38.529.172.937,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 17.419.724.937,- dan belanja langsung sebesar Rp. 21.109.448.000,- dengan melaksanakan 13 (tiga belas) program pembangunan yang terdiri dari 70 kegiatan.

Tetapi pada perjalanannya terjadi Efisiensi sehingga pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 22.293.587.382,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.911.661.512,- dan belanja langsung sebesar Rp. 7.381.925.870,-. Realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.556.722.046,- atau sebesar 96,69%, yang terdiri dari realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.441.997.427,- atau sebesar 96,85% dan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.7.114.724.619,- atau sebesar 96,38%. Berikut realisasi capaian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 :



**Tabel 3.14**  
**Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Keuangan				
			No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1	Pengembangan Sumber Daya Industri	91,817,300	91,506,000	99.66
			2	Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	476,333,900	474,848,000	99.69
			3	Pemberdayaan Industri	1,274,840,000	1,255,723,000	98.50
			4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	172,271,250	168,659,000	97.90
			5	Peningkatan Layanan Rumah Kemasan dan Workshop Industri	199,713,000	199,159,200	99.72
			<b>TOTAL PER SASARAN</b>			<b>2,214,975,450</b>	<b>2,189,895,200</b>
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	1 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB	1	Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa	86,237,600	72,399,150	83.95
			2	Pengujian Mutu Barang	471,040,850	451,042,750	95.75
			<b>TOTAL PER SASARAN</b>			<b>557,278,450</b>	<b>523,441,900</b>
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	1 Nilai Ekspor Non Migas	1	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	207,601,100	176,933,400	85.23
			<b>TOTAL PER SASARAN</b>			<b>207,601,100</b>	<b>176,933,400</b>
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	1 Andil Inflasi Bahan Makanan	1	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	600,255,000	585,209,200	97.49
			2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,580,284,470	2,465,011,329	95.53
			3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	883,959,100	853,304,490	96.53
			4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	67,047,300	52,087,000	77.69
			5	Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan , serta asset Perangkat Daerah	270,525,000	268,841,300	99.38
			<b>TOTAL PER SASARAN</b>			<b>4,402,070,870</b>	<b>4,224,453,319</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>7,381,925,870</b>	<b>7,114,723,819</b>	<b>96.38</b>		



### 3.5 Prestasi OPD yang di Raih Selama Tahun 2020

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/Intansi). Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para pegawainya. Dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu OPD, dibutuhkan kerjasama dan dedikasi yang tinggi di Antara para pegawainya. Begitu pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terus berusaha untuk berbenah dalam prestasi kerja yang diraih.

Prestasi Kerja yang diraih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2020 adalah : ***“Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020”***



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 96,33 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,46 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 88,57 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 56,52 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, terdapat 2 capaian dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi** yaitu sasaran "meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan" dan "Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan"; kemudian 1 capaian dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **tinggi** yaitu sasaran "Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri"; serta 1 capaian dengan kriteria penilaian realisasi kinerja rendah yaitu "Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting". Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam rangka mencapai



target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 38.529.172.937,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 17.419.724.937,- dan belanja langsung sebesar Rp. 21.109.448.000,-. Tetapi pada perjalanannya terjadi Efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 22.293.587.382,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.911.661.512,- dan belanja langsung sebesar Rp. 7.381.925.870,-. Realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.556.722.046,- atau sebesar 96,69% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 736.865.336,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung masih perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung.

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternatif-alternatif strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Adapun langkah – langkah ke depannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya industri secara berkelanjutan;
- b. Meningkatkan daya saing industri andalan, pendukung dan hulu;
- c. Pembinaan PKM dan Promosi Produk PKM;
- d. Pengendalian harga barang pokok dan strategis;
- e. Perluasan pasar ekspor Non Tradisional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

# LAMPIRAN



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATRIA ALAM, S.E., M.Si.  
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARINAL DJUNAIDI  
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN PROVINSI  
LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19610307 198603 1 007

Pihak Kedua,



LAMPIRAN P-APBD

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meringkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	20,15 %
2	Meringkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	11,2 %
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas	3,5 Miliar US\$
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	0,10 - 0,50 %

PROGRAM

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.610.284.470	P-APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 883.959.100	P-APBD
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Rp 67.047.300	P-APBD
4. Perencanaan, Evaluasi dan keuangan,serta asset Perangkat Daerah	Rp 270.525.000	P-APBD
5. Peningkatan dan PengembanganPerdagangan Dalam Negeri	Rp 600.255.000	P-APBD
6. Pengembangan Sumber Daya Industri	Rp 91.817.300	P-APBD
7. Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan atau/jasa	Rp 86.237.600	P-APBD
8. Peningkatan Kerjasama,Pengawasandan Promosi Investasi Industri	Rp 476.333.900	P-APBD
9. Pengujian Mutu Barang	Rp 471.040.850	P-APBD
10. Pemberdayaan Industri	Rp 1.274.840.000	P-APBD
11. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Rp 207.601.100	P-APBD
12. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 142.271.250	P-APBD
13. Peningkatan Layanan Rumah Kemasan dan Workshop Industri	Rp 199.713.000	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 7.381.925.870</b>	<b>P-APBD</b>

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG



**SATRIA ALAM, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIB 19610307 198603 1 007

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung  
Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target			Rp.	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)	0 - 2,5	1,811,170,000	0 - 2,5	3,005,000,000	0 - 2,5	3,723,000,000	0 - 2,5	4,860,000,000	0 - 2,5	5,710,000,000	0 - 2,5	19,109,230,000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri			
						Nilai PDRB sektor perdagangan (triliun rupiah)	29.87		31.61		33.5		35.52		37.71							
						1 Pemantauan harga bahan pokok serta barang strategis	1	68,170,000	1	75,000,000	1	90,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	5	453,170,000				
						2 Penetrasi pasar kebutuhan bahan pokok	5	46,000,000	5	100,000,000	7	175,000,000	7	250,000,000	7	300,000,000	31	871,000,000				
						3 Pasar Murah Bersubsidi	10	500,000,000	20	1,000,000,000	30	1,500,000,000	45	2,250,000,000	50	2,500,000,000	155	7,750,000,000				
						4 Pemantauan sarana distribusi perdagangan	1		1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	5	335,000,000				
						5 Pemasaran Produk PKM Unggulan	8	150,000,000	12	250,000,000	15	300,000,000	18	350,000,000	20	400,000,000	73	1,450,000,000				
						6 Forum Koordinasi Penataan Pasar dan Sarana Perdagangan	2	150,000,000	2	150,000,000	2	175,000,000	3	175,000,000	4	200,000,000	13	850,000,000				
						7 Fasilitas Merk Dagang dan Halal	50	83,000,000	60	200,000,000	65	250,000,000	70	300,000,000	75	350,000,000	320	1,183,000,000				
						8 Diklat Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Dokumen dan Persyaratan Dalam Perdagangan Dalam Negeri	50	39,000,000	50	50,000,000	60	75,000,000	75	85,000,000	90	90,000,000	325	339,000,000				
						9 Transformasi Digital UKM/PKM Unggulan	100	150,000,000	100	400,000,000	120	450,000,000	120	450,000,000	150	500,000,000	590	1,950,000,000				
						10 Promosi Luar Daerah	3	150,000,000	3	200,000,000	4	250,000,000	4	300,000,000	5	350,000,000	19	1,250,000,000				
						11 Promosi Produk Unggulan Pada Even Nasional	2	200,000,000	2	250,000,000	2	300,000,000	4	400,000,000	4	450,000,000	14	1,600,000,000				
						12 Profil Produk Unggulan	1	200,000,000	1	200,000,000					1	250,000,000	3	650,000,000				
13 Membangun Jejaring Pasar Dalam Daerah dan Luar Daerah	1	75,000,000	1	80,000,000	1	83,060,000	1	90,000,000	1	100,000,000	5	428,060,000										
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)		Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%)	10	760,000,000	12.5	1,265,000,000	15	1,530,000,000	17.5	1,855,000,000	20	2,265,000,000	85	7,775,000,048	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			
					1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen	Jumlah sosialisasi pemahaman pentingnya perlindungan bagi konsumen (kali)	1		1	50,000,000	1	55,000,000	1	75,000,000	1	85,000,000	5	265,000,000				
					2 Pengawasan barang-barang dalam pengawasan (Barang Berbahaya dan minuman beralkohol)	Jumlah pengawasan B2 dan minuman beralkohol yang diperdagangkan per tahun (kali)	4	70,000,000	4	70,000,000	4	100,000,000	7	150,000,000	10	200,000,000	29	590,000,000				
					3 Pengawasan barang beredar dan jasa	Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa (kali)	10	100,000,000	10	110,000,000	12	150,000,000	20	250,000,000	30	300,000,000	82	910,000,000				
					4 Pengawasan barang yang diatur tata niaganya	Jumlah pengawasan (kali)	9	90,000,000	9	95,000,000	10	110,000,000	20	200,000,000	22	250,000,000	70	745,000,000				
					5 Fasilitas Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen	Jumlah BPSK yang difasilitasi (unit)	3	200,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	400,000,000	3	400,000,000	15	1,700,000,000				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								1		2		3		4		5				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					6	Diklat Penyusunan ISO 9000 dalam rangka penerapan SNI	Jumlah pelaku usaha yang ikut diklat penerapan ISO 9000 (org)	0		50	70,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	200	310,000,000	
					7	Festival Konsumen Cerdas	Jumlah konsumen dan pelaku usaha peserta festival (Orang)	1000	300,000,000	1000	350,000,000	1100	400,000,000	1200	450,000,000	1300	500,000,000	5600	2,000,000,000	
					8	Pengawasan barang beredar pada wilayah perbatasan	Jumlah pengawasan barang import yang masuk daerah perbatasan (kali)					5	100,000,000	5	125,000,000	5	150,000,000	15	375,000,000	
					9	Penegakan hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen & UU Perdagangan	Jumlah kasus yang ditangani	3		3	85,000,000	3	85,000,000	3	125,000,000	3	175,000,000	15	470,000,000	
					10	Pengawasan tata niaga perdagangan	Jumlah pengawasan tata niaga perdagangan (kali)	5		5	85,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	8	125,000,000	30	410,000,000	
						<b>Program Pengujian Mutu Barang</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengujian Mutu</b>	<b>1%</b>	<b>7,150,000,000</b>	<b>2%</b>	<b>2,075,000,000</b>	<b>3%</b>	<b>2,020,000,000</b>	<b>4%</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>5%</b>	<b>2,800,000,000</b>	<b>5%</b>	<b>10,720,000,000</b>	<b>UPTD BPSMB</b>
					1	Peningkatan Sarana Laboratorium	Jumlah pengadaan sarana pengujian laboratorium (unit)	7	350,000,000	8	700,000,000	6	500,000,000	7	500,000,000	7	700,000,000	35	2,750,000,000	
					2	Pelayanan Mutu Komoditi	Jumlah Sertifikat mutu komoditi (sertifikat)	1,810	400,000,000	1,856	500,000,000	1,874	550,000,000	1,912	700,000,000	1,940	800,000,000	9392	2,950,000,000	
					3	Peningkatan Kompetensi penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh	Jumlah SDM penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh	2	150,000,000	3	200,000,000	4	250,000,000	5	300,000,000	6	350,000,000	20	1,250,000,000	
					4	Pelayanan Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah waktu pelayanan (tahun)	1	350,000,000	1	375,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000	5	2,075,000,000	
					5	Pelayanan Sertifikat Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi (sertifikat)	20	150,000,000	24	150,000,000	26	150,000,000	28	150,000,000	35	200,000,000	133	800,000,000	
					6	Peningkatan kompetensi SDM Lab.kalibrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan (orang)	5	125,000,000	5	150,000,000	5	170,000,000	5	200,000,000	5	250,000,000	25	895,000,000	
					7	DAK Peralatan Laboratorium	Jumlah alat laboratorium (unit)	3	5,625,000,000											
		<b>Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri</b>	<b>Nilai ekspor non migas (miliar US\$)</b>			<b>Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah</b>	<b>Pelaku usaha yang menjadi eksportir (UKM)</b>	<b>5</b>	<b>1,533,164,500</b>	<b>10</b>	<b>2,750,000,000</b>	<b>10</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>15</b>	<b>4,625,000,000</b>	<b>20</b>	<b>5,800,000,000</b>	<b>60</b>	<b>10,330,000,000</b>	<b>Bidang Perdagangan Luar Negeri</b>
					1	Akses, Survey dan Konsultasi Pasar Ekspor Bagi UKM Melalui Digital Marketing	Jumlah eksportir baru yang memanfaatkan digital market (orang)	4	100,000,000	5	300,000,000	7	450,000,000	8	600,000,000	10	750,000,000	34	2,200,000,000	
					2	Pemberian Penghargaan Eksportir Terbaik Tahunan	Jumlah kegiatan penghargaan eksportir terbaik (kegiatan)	1	140,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	865,000,000	
					3	Diklat Peningkatan Kualitas Ekspor	Jumlah peserta diklat peningkatan kualitas ekspor (orang)	50	70,000,000	100	250,000,000	150	350,000,000	200	500,000,000	200	700,000,000	700	1,870,000,000	
					4	Bimtek bagi calon eksportir dan eksportir pemula	Jumlah eksportir yang mengikuti diklat (orang)	50	100,000,000	100	250,000,000	150	350,000,000	200	500,000,000	200	700,000,000	700	1,900,000,000	
					5	Verifikasi dan Identifikasi Asal Barang Ekspor di Provinsi Lampung	Jumlah Laporan Produk Asal Lampung (laporan)	12	120,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	1,220,000,000	
					6	Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan Impor	Laporan Realisasi Ekspor dan Impor (laporan)	2	50,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	125,000,000	2	200,000,000	10	525,000,000	
					7	Forum Peningkatan Kapasitas Peningkatan, Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Ekspor Lampung	Jumlah produk ekspor baru (produk)	10	250,000,000	10	300,000,000	10	350,000,000	10	400,000,000	10	450,000,000	50	1,750,000,000	
					8	Promosi Produk Ekspor	Jumlah UKM yang dipromosikan (UKM)	4	150,000,000	4	225,000,000	5	300,000,000	6	400,000,000	8	450,000,000	27	1,525,000,000	
					9	Promosi Luar Negeri	Jumlah UKM yang dipromosikan (UKM)	3	483,164,500	3	600,000,000	3	700,000,000	4	850,000,000	4	1,000,000,000	17	3,633,164,500	
					10	Pencitraan Produk Unggulan Ke Luar Negeri	Jumlah tujuan negara promosi (negara)	10	70,000,000	25	400,000,000	30	500,000,000	40	750,000,000	50	1,000,000,000	155	2,720,000,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Pengikat Daerah Penanggung Jawab		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)		<b>Program Pengembangan Sumber Daya Industri</b>	<b>Prosentase peningkatan akses pada Sumber Daya Industri (%)</b>		8.19	1,015,000,000	8.27	990,000,000	8.36	1,415,000,000	8.48	1,871,813,000	8.52	2,200,000,000	8.52	7,491,813,000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri		
					1	Penyusunan Data Kebutuhan SDM Industri	Jumlah dokumen data kebutuhan SDM Industri (dokumen)	1	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200,000,000			
					2	Link and Match antara Lembaga Pendidikan dengan Dunia Industri	Jumlah fasilitasi teknik peningkatan akses SDM Industri (MOU)	1	185,000,000	5	265,000,000	5	290,000,000	5	350,000,000	5	450,000,000	21	1,540,000,000			
					3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Industri	Jumlah SDM Industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi (orang)	30	220,000,000	60	300,000,000	90	460,000,000	120	771,813,000	150	900,000,000	450	2,651,813,000			
					4	Pemetaan Potensi Bahan Baku Industri di Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi bahan baku industri (dokumen)	1	210,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	210,000,000			
					5	Pemjaminan Ketersediaan, Pemanfaatan dan Distribusi Sumber Daya Alam untuk Bahan Baku Industri	Jumlah fasilitasi teknik peningkatan akses SDA Industri (kegiatan)	0	-	5	200,000,000	5	365,000,000	5	400,000,000	5	450,000,000	20	1,415,000,000			
					6	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	Jumlah fasilitasi teknik pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri (kegiatan)	2	200,000,000	2	225,000,000	2	300,000,000	3	350,000,000	3	400,000,000	12	1,475,000,000			
						<b>Program Peningkatan Kejasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri</b>	<b>Prosentase peningkatan nilai Investasi Sektor Industri (%)</b>	4.32	1,200,000,000	4.36	1,830,000,000	4.40	2,237,500,000	4.45	2,600,000,000	4.51	3,100,000,000	4.51	10,967,500,000	Bidang Kejasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri		
					1	Penyusunan Data Potensi Kemitraan Industri	Jumlah dokumen data kemitraan industri (dokumen)	1	150,000,000	1	150,000,000	0	-	0	-	0	-	2	300,000,000			
					2	Pengembangan Kerja sama dan Kemitraan Bidang Industri	Jumlah kesepakatan kerja sama dan/atau kemitraan bidang industri (MOU)	0	-	5	400,000,000	6	585,000,000	7	650,000,000	8	750,000,000	26	2,385,000,000			
					3	Fasilitasi Pemasaran Produk Industri Unggulan Daerah	Jumlah pemasaran produk industri yang terfasilitasi (kegiatan)	2	300,000,000	2	300,000,000	2	450,000,000	2	450,000,000	2	500,000,000	10	2,000,000,000			
					4	Peningkatan Promosi Investasi dan Fasilitasi Penanaman Modal Bidang Industri	Jumlah promosi investasi bidang industri yang (kegiatan)	5	300,000,000	6	380,000,000	7	450,000,000	8	550,000,000	9	700,000,000	35	2,380,000,000			
					5	Pemantauan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Bidang Industri	Jumlah unit usaha industri besar yang dipantau (unit)	100	250,000,000	120	350,000,000	130	450,000,000	140	550,000,000	150	700,000,000	640	2,300,000,000			
					6	Fasilitasi Perizinan Bidang Industri	Jumlah penerbitan Rekomendasi IUI Besar (rekomendasi)	12	200,000,000	13	250,000,000	14	302,500,000	15	400,000,000	16	450,000,000	70	1,602,500,000			
						<b>Program Pemberdayaan Industri</b>	<b>Prosentase peningkatan nilai ekspor produk Industri (%)</b>	2.09	2,010,000,000	2.12	2,730,000,000	2.16	3,125,000,000	2.20	3,750,000,000	2.25	4,216,105,000	2.25	15,831,105,000	Bidang Pemberdayaan Industri		
					1	Bimbingan Teknis Gugus Kendali Mutu (GKM)	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan (orang)	0	-	100	325,000,000	100	375,000,000	120	450,000,000	120	500,000,000	440	1,650,000,000			
					2	Bimbingan Teknis Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) IKM Makanan dan Minuman	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan (orang)	60	160,000,000	100	325,000,000	100	350,000,000	120	425,000,000	120	500,000,000	500	1,760,000,000			
					3	Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk (orang)	100	400,000,000	140	480,000,000	180	600,000,000	220	750,000,000	220	800,000,000	860	3,030,000,000			
					4	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri	Jumlah fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi industri (kegiatan)	3	1,100,000,000	4	1,200,000,000	4	1,300,000,000	4	1,475,000,000	4	1,616,105,000	19	6,691,105,000			
					5	Pembinaan Industri Hijau	Jumlah industri yang terfasilitasi dalam penerapan prinsip-prinsip industri hijau (unit)	30	350,000,000	30	400,000,000	30	500,000,000	30	650,000,000	30	800,000,000	150	2,700,000,000			
						<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri</b>	<b>Prosentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar (%)</b>	5.06	2,075,000,000	5.09	2,765,000,000	5.11	3,325,000,000	5.15	3,925,000,000	5.18	4,400,000,000	5.18	16,490,000,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri		
					1	Pembinaan Standarisasi Industri	Jumlah unit usaha industri yang menerapkan standarisasi industri (unit)	25	300,000,000	35	550,000,000	45	700,000,000	50	950,000,000	60	1,150,000,000	215	3,650,000,000			
					2	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Jumlah kegiatan pengembangan KI (kegiatan)	10	800,000,000	10	1,000,000,000	10	1,150,000,000	10	1,250,000,000	10	1,350,000,000	50	5,550,000,000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Date Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target			Rp.	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
					3	Pendampingan dan Pengembangan Sentra IKM	Jumlah sentra industri yang dikembangkan (sentra)		10	275,000,000	12	300,000,000	14	375,000,000	15	450,000,000	15	500,000,000	66	1,850,000,000		
					4	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Industri	Jumlah fasilitas pembangunan infrastruktur penunjang industri (kegiatan)		2	150,000,000	2	200,000,000	2	250,000,000	2	300,000,000	2	350,000,000	10	1,250,000,000		
					5	Pengelolaan Data dan Informasi Industri	Jumlah dokumen informasi industri besar (dokumen)		1	600,000,000	1	715,000,000	1	850,000,000	1	975,000,000	1	1,050,000,000	5	4,190,000,000		
						<b>Program Peningkatan Layanan Rumah Kemas, dan Workshop Industri</b>	<b>Prosentasi peningkatan jumlah IKM yang terlayani (%)</b>		<b>8.71</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>12.18</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>18.67</b>	<b>1,895,000,000</b>	<b>20.56</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>21.38</b>	<b>2,250,000,000</b>	<b>21.38</b>	<b>8,995,000,000</b>	<b>LPTD Rumah Kemas dan Workshop Industri</b>	
					1	Penyediaan Jasa Administrasi dan Sarana Prasarana perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran (bulan)		12	400,000,000	12	500,000,000	12	550,000,000	12	600,000,000	12	650,000,000	60	2,700,000,000		
					2	Peningkatan Layanan Rumah Kemas	Jumlah IKM yang memperoleh layanan rumah kemas (orang)		500	400,000,000	600	550,000,000	750	725,000,000	900	800,000,000	1200	850,000,000	3,950	3,325,000,000		
					3	Peningkatan Layanan Workshop Industri	Jumlah IKM yang memperoleh layanan workshop industri (orang)		60	400,000,000	80	500,000,000	100	620,000,000	125	700,000,000	150	750,000,000	515	2,970,000,000		
						<b>PENUNJANG</b>																
						<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)</b>		<b>85</b>	<b>2,710,300,000</b>	<b>88</b>	<b>2,917,130,000</b>	<b>90</b>	<b>2,996,000,000</b>	<b>93</b>	<b>3,147,000,000</b>	<b>95</b>	<b>3,240,000,000</b>	<b>95</b>	<b>15,010,430,000</b>	<b>Sekretariat</b>	
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)		100	859,500,000	100	900,000,000	100	950,000,000	100	1,050,000,000	100	1,100,000,000	100	4,859,500,000		
					2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan (%)		100	408,000,000	100	640,000,000	100	640,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	100	2,988,000,000		
					3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor (%)		100	240,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	720,000,000		
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK (buah)		1500	80,000,000	1500	80,130,000	1500	81,000,000	1600	85,000,000	1700	90,000,000	7800	416,130,000		
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (lembar)		110,875	50,000,000	110,875	50,000,000	115,000	55,000,000	115,000	55,000,000	115,000	55,000,000	566,750	265,000,000		
					6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik (buah)		210	50,000,000	210	50,000,000	210	50,000,000	230	55,000,000	240	60,000,000	1100	265,000,000		
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (buku)		7	25,000,000	7	27,000,000	8	30,000,000	8	32,000,000	8	35,000,000	38	149,000,000		
					8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan dan minum (kali)		40	34,600,000	45	40,000,000	45	40,000,000	55	45,000,000	65	50,000,000	250	209,600,000		
					9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi (kali)		97	301,200,000	110	330,000,000	115	350,000,000	120	375,000,000	125	400,000,000	567	1,756,200,000		
					10	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTH (orang)		28	662,000,000	28	680,000,000	28	680,000,000	28	680,000,000	28	680,000,000	28	3,382,000,000		
						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)</b>		<b>70</b>	<b>1,203,865,500</b>	<b>73</b>	<b>1,110,000,000</b>	<b>75</b>	<b>1,170,000,000</b>	<b>78</b>	<b>1,245,000,000</b>	<b>80</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>80</b>	<b>6,028,865,500</b>		
					1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung (unit)		8	387,600,900	9	225,000,000	10	250,000,000	11	275,000,000	12	300,000,000	50	1,437,600,900		
					2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)		4	220,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	1,320,000,000		
					3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)		17	546,264,600	17	575,000,000	17	600,000,000	17	600,000,000	17	625,000,000	17	2,946,264,600		
					4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (unit)		80	50,000,000	80	60,000,000	80	70,000,000	100	70,000,000	100	75,000,000	90	325,000,000		

